

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Kette Soleman, “ *Bahan Ajar Hukum Acara Perdata*”
- Harahap Muda Arifudin, 2020, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*”, Malang, Cv Literasi Nusantara Abadi
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi, Unimal Press
- Tio Serepina Sianaan, 2019, *Penanganan Perkara Perdata pada Tingkat Pertama*, November
- Soejorno Soekanto, S.H., M.A. & Sri Mamudji, S.H., M.L.L., 2014, penelitian hukum normative, rajagrafindo persada
- Rodiatun Adawiyah, Kartina Pakpahan, Willy Tanjaya, Muhammad Arif Prasetyo, Mymoonah Ruhut Martona Sitanggang, Minggu Saragih, “Buku Penyelesaian Hubungan Industrial”, Unpri Press
- Abdullah Sulaiman, 2019, “ *Hukum ketenagakerja/ Perburuhan*” , Jakarta, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Jurnal:

- Hansen Alandia, Dian Ety Mayasari, “ Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4 No. 2 November 2023
- Oktaviana Prayudhani,” Peta Ketidaksesuaian Kualifikasi Sektoral Di Indonesia”. *Jurnal Ketenagakerjaan* Vol. 15 No. 2, Juli – Desember 2020
- Yuniarti Tri Suwadji,” Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Melalui Perundingan Bipartit”, *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 14 No. 2, Juli – Desember 2019
- Lia Oktavia, “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4, December 2024
- Dara Sari Sinaga, Akmaluddin Syahputra, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak”, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 39, No. 1, Maret
- Nikodemus Maringan, “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , Volume 3, Tahun 2015

Undang-undang

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan perairan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
5. HIR, RBG

Putusan Pengadilan

1. Nomor 12/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
2. Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2017
3. Nomor 149 PK/Pdt.Sus. PHI/2018